



# KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

## *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia 29 fl, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484, 5274485 Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

### KEPUTUSAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 2006 Nomor : 04/Rapimnas/III/2006

Tentang

### PENGESAHAN HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI 2006

Rapat Pimpinan Nasional  
Kamar Dagang dan Industri 2006

- Menimbang : a. bahwa hasil Sidang-sidang Komisi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2006 telah dilaporkan kepada seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno Rapimnas Kadin 2006 ;
- b. bahwa laporan hasil Sidang-sidang Komisi tersebut telah disetujui dan diterima oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno Rapimnas Kadin 2006 sehingga oleh karena itu perlu segera disahkan sebagai hasil Rapimnas Kadin 2006 ;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rapimnas Kadin 2006 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.
- Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi A tentang Organisasi, Sidang Komisi B tentang Program Kerja Tahun 2006 dan Sidang Komisi C tentang Kebijakan Strategik dan Langkah Taktis dalam Rapimnas Kadin 2006 tanggal 7-8 Maret 2006 di Jakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006 tentang Pengesahan Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006.
- Pertama : Mengesahkan hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006 yang berlangsung pada tanggal 7-8 Maret 2006 di Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Sekretariat





# KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

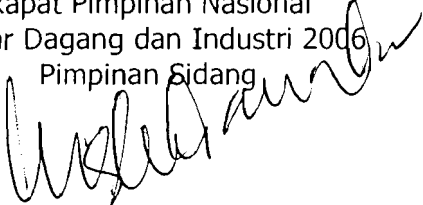
## *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*

Menara Kadin Indonesia 29 fl, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484, 5274485 Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

- Kedua : Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006 sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah hasil Sidang Komisi A tentang Organisasi, hasil Sidang Komisi B tentang Program Kerja Tahun 2006 dan hasil Sidang Komisi C tentang Kebijakan Strategik dan Langkah Taktis yang telah disetujui dan diterima oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno Rapimnas Kadin 2006.
- Ketiga : Memberi wewenang kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menyempurnakan redaksional hasil Rapimnas Kadin 2006 sebagaimana dimaksud diktum Pertama.
- Keempat : Merekomendasikan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menindaklanjuti Hasil Rapimnas Kadin 2006 dan mendistribusikannya kepada seluruh jajaran Kadin serta instansi terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Maret 2006

An  
Rapat Pimpinan Nasional  
Kamar Dagang dan Industri 2006  
Pimpinan Sidang



Mohamad S. Hidayat

Sekretariat



**HASIL SIDANG KOMISI A  
ORGANISASI  
RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2006  
JAKARTA, 7 MARET 2006**

Sidang Komisi Organisasi Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006 di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2006 dengan agenda pembahasan Program Kerja Organisasi Kadin 2006, diikuti oleh 67 Peserta (daftar terlampir) dengan Pimpinan Sidang sekaligus anggota Tim Perumus :

Pimpinan Sidang :

1. Adi P. Tahir ( Ketua )
2. Arfan Sofan
3. M. Taufik Mustafa
4. A. Rahman Usman
5. Bambang Widodo
6. Machdizar
7. Budoyo Basuki
8. Kohar A.S.

Tim Perumus

1. A. Rachman Usman (Kadin Indonesia)	11. H. Andi Sjamsuddin (Kadin Kaltim)
2. Arfan Sofan (Kadin Indonesia)	12. Sugiarto Purnomoyadi (Kadin Sumsel)
3. M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia)	13. Ronny Lumempouw (Kadin Sulut)
4. Krishna Trypriadharna (Kadin Indonesia)	14. Zirma Juneldi (Kadin Sumbar)
5. Berry B. Purba (APTEK)	15. H. Momo Suparmo (Kadin Jabar)
6. Heri (Kadin Kepri)	16. H. Arifin Palili (Kadin Sulteng)
7. Erwan Yulial (Kadin Riau)	17. Joko Adi Wibowo (Kadin Jabar)
8. Bahar Ngitung (Kadin Sulsel)	18. R. A. Hj..Ning Sudjito (APJI)
9. Rapii (Kadin NTB )	19. Machdizar (HIPPI)
10.Deddy Suhajadi (Kadin Jatim)	20. Bambang Widodo (Kadin DKI)

Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2006 :

1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara
2. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia
3. Sambutan Menko Perekonomian Republik Indonesia
4. Executive summary Program Kerja Kadin 2006
5. Paparan DR. Sjahrir, Penasehat Ekonomi Presiden RI
6. Paparan Marie Elka Pangestu, Menteri Perdagangan RI
7. Hasil Pembahasan yang disampaikan Peserta/Peninjau dalam Sidang Pleno

Dengan Acuan Utama :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004
3. Keputusan Rapimnas Kadin 2005 tentang Program Kerja Kadin 2005

Sidang Tim Perumus memutuskan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja Kadin 2006 yang disusun atas dasar rancangan program kerja Kadin 2006 yang disampaikan dalam sidang pleno dan tanggapan/usulan peserta sidang pleno, meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perkuatan kelembagaan
    - a.1. Peningkatan Kapasitas Manajemen: Pembuatan Modul Pelatihan  
Pembuatan modul-modul standar pelatihan bagi peningkatan kapasitas manajemen Kadin/ Asosiasi, baik ditujukan untuk peningkatan profesionalitas pengurus dan staf maupun untuk layanan anggota. Jenis modul pelatihan antara lain ekspor-impor, wirausaha baru (*start up*), layanan perpajakan, layanan hukum, layanan *business matching*.
    - a.2. Peningkatan Kapasitas Manajemen kesekretariatan organisasi.  
Penyelenggaraan lokakarya/ pelatihan manajemen bagi DE/ pimpinan sekretariat Kadin/ Asosiasi se Indonesia. Lokakarya/ pelatihan mengambil modul seperti diterapkan oleh EuroChamber Academy.
    - a.3. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Organisasi (*Chamber Manual*)  
Sebagai kelanjutan dari pengesahan AD/ ART Munassus Kadin 8 Maret 2006, maka diperlukan penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Organisasi (*Chamber's Manual*), sekaligus revisi terhadap *Chamber's Manual* yang lama. Kandungan isi antara lain petunjuk pelaksanaan Muprov, Mukab, Mukota, Pembagian Peran Kadin dan Asosiasi / Himpunan dengan Prinsip azas berimbang, Penyelenggaraan Layanan Organisasi, Penegakan Etika Bisnis, Penggabungan Kegiatan Kadin Kabupaten/Kota.
    - a.4. Membentuk Lembaga Akreditasi Asosiasi.
    - a.5. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1987 dan Keppres 14 tahun 2004 mensyaratkan KTA Kadin sebagai persyaratan tender pengadaan barang dan jasa.
  - b. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah
    - b.1. Pemanfaatan Data/ Informasi WDP  
Program ini merupakan kelanjutan dari program kerja tahun 2005. Program saat ini berjalan dengan implementasi pilot proyek di lima kota: Batam, Surabaya, Pekanbaru, Semarang dan Bandung. Penyelenggaraan program dilakukan atas kerjasama Kadin Indonesia dengan Departemen Perdagangan RI (tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor : 01/M-DAG/KSB/6/2005 dan Nomor 070/DP/VI/2005), serta Kadin Kota dengan Pemerintah Kota setempat. Pilot proyek dijadwalkan selesai pada Desember 2006 disosialisasikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
    - b.2. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah  
Program merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 500/1883/V/Bangda tanggal 16 Desember 2005 tentang Kerjasama Ekonomi Daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Konsesi. Kegiatan yang akan dilakukan :
      - Pembentukan tim/ lembaga bersama yang melibatkan Kadin pada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota agar tugas tim/ lembaga bersama tersebut adalah sebagai penilai kelayakan (*shortlist*) pelaku usaha dalam kegiatan pengembangan perekonomian daerah.
      - Penyelenggaraan Promosi Potensi Ekonomi Daerah seluruh Indonesia pada 31 Agustus 2006 di Yogyakarta.

- Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Umum Kadin Indonesia, yang antara lain memuat kegiatan bersama dalam promosi daerah, pemberian keterangan kelayakan usaha bagi UKM, layanan satu pintu dalam perijinan, promosi potensi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas manajemen UKM melalui lokakarya, pelatihan, konsultasi/ bimbingan, informasi/ akses pasar, akses pembiayaan.
- b.3. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1987.
- c. Peningkatan layanan anggota
- c.1. Pengembangan Sistem Informasi di Kadin Provinsi dan Kabupaten serta Kota  
Program ini ditujukan untuk memperlancar komunikasi kerja, pertukaran informasi dan layanan Informasi kepada anggota Kadin/ Asosiasi di seluruh Indonesia. Secara bertahap telah dilakukan mulai periode 2004/ 2005 lalu. Kegiatan yang telah dan akan dilanjutkan antara lain Pemberian alamat email kepada 32 provinsi, dan 400 kabupaten/ kota; penyediaan web hosting; penyediaan template desain web.
- c.2. Pelatihan Kewirausahaan  
Program ini merupakan kontribusi Bidang Keorganisasian dalam pembentukan jiwa kewirausahaan, terutama bagi calon wirausaha baru dan calon pensiunan. Penyelenggaraan dilakukan Pokja Asosiasi dan Himpunan bekerjasama dengan Masyarakat Enterprenur Indonesia (MEI), Gerakan Kewirausahaan Pemuda, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Departemen Pendidikan Nasional RI. Program berkeinginan mencetak Sejuta Enterprenur's melalui pola 'mentoring', bimbingan dan pembinaan selama 5 tahun melalui lokakarya dan pelatihan. Pada tahun 2005 telah dihasilkan 120 mentor, dan pada tahun 2006 ditargetkan 150 mentor.
- c.3. Layanan Perjalanan  
Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia telah bekerjasama dalam fasilitasi layanan perjalanan/ tiket sejak tahun 2005. Dalam evaluasi tahunan, program layanan ini telah disepakati untuk menggunakan system kartu bekerjasama dengan perbankan. Melalui system dimaksud, diharapkan program layanan dapat lebih efektif, efisien dan percepatan proses. Diproyeksikan system baru ini dapat mulai diterapkan pada April 2006.
- c.4. Penerbitan Brosur Promosi Keanggotaan  
Dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang-Bidang terkait menerbitkan brosur atau modul yang dapat dipergunakan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan keanggotaan Kadin antara lain Pendaftaran Perusahaan, Informasi Bisnis, Kontak Bisnis, Promosi Dagang & Investasi, Dokumen Dagang, Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi Bisnis, Konsultasi Perpajakan dan Akutansi, Pendampingan UKM, Layanan Teknis Administratif, Penyediaan Shortlist Sumber Daya Keahlian.
- c.5. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Anggota Biasa/Anggota Tercatat dan Anggota Luar Biasa/Anggota Luar Biasa Tercatat  
Tercatat, Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban berbeda. Untuk itu, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dan Anggota

Tercatat, serta Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan Luar Biasa Tercatat.

- c.6. Monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Tahun 2006  
Sesuai ketentuan AD/ART Kadin, pelaksanaan Muprov Kadin wajib dilaksanakan tepat waktu. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dan penyediaan fasilitas penyiapan penyelenggaraannya. Kadin Provinsi yang habis masa bakti kepengurusannya pada tahun 2006 adalah Kadin Kalimantan Selatan (Muprov lanjutan), Kadin Bengkulu (20 Januari 2006), Kadin Jambi (1 Maret 2006), Kadin Jawa Tengah (19 April 2006), Kadin Riau (13 Juni 2006), Kadin Kalimantan Timur (29 Juli 2006), Kadin Lampung (9 Agustus 2006), dan Kadin Sumatera Utara (6 November 2006).
  - c.7. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan  
Setiap organisasi yang bergerak di bidang perekonomian, antara lain Asosiasi/Himpunan wajib mematuhi UU Nomor 1 tahun 1987 dan mencantumkan pada AD/ ART nya sebagai landasan organisasi. Dalam kaitan ini, Kadin Indonesia melakukan kegiatan pemantauan dan penyediaan fasilitas bantuan apabila dibutuhkan, serta ditujukan agar Asosiasi/ Himpunan dapat menjalankan demokrasi sesuai AD/ ARTnya.
  - c.8. Pembangunan File Data Perekonomian  
Pembangunan file data perekonomian terkini secara elektronik tengah dirancang bersama Jetro. Ketersediaan data dalam server Kadin Indonesia dapat digunakan oleh pengguna internal dan eksternal Kadin, khususnya bagi Bidang/ Komite Tetap/ Komite Bilateral dan lainnya. Pembangunan dijadwalkan selesai dalam tahun 2006.
  - c.9. Penerbitan Jurnal dan Kuartal Analisa Perekonomian  
Kerjasama dengan Jetro juga tengah menjejaki program penerbitan jurnal bulanan dan triwulanan Analisa Perekonomian. Penerbitan jurnal bulanan menyangkut analisa data perekonomian terbaru. Sedangkan jurnal triwulan menyangkut perkembangan dan permasalahan sektor/ sub sektor ekonomi. Penerbitan dijadwalkan mulai awal semester II 2006.
  - c.10. Pemberian Kadin Award kepada Gubernur dan Kadin Provinsi yang berhasil dalam kerjasama, peningkatan anggota dan pembinaan perusahaan.
2. Memutuskan dan menetapkan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) untuk melakukan perubahan dan pengesahan atas perubahan AD sesuai koreksi dari Pemerintah mengenai perlu-tidaknya Persetujuan Presiden terhadap setiap perubahan AD/ART Kadin dan penyebutan Kadin sebagai bagian dari Organ Negara.


Pimpinan Sidang Komisi A *Sp.*

Ketua Sidang



Adi P. Tahir

Ketua Tim Perumus



A. Rachman Usman

**LAPORAN HASIL SIDANG KOMISI B  
PROGRAM KERJA KADIN 2006  
RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2006  
7 MARET 2006**

---

**Pimpinan Sidang**

Ketua : Hamzah (Kadin Lampung)  
Sekretaris : Handito Hadi Joewono (Kadin Indonesia)

**Nara Sumber**

1. Ibu Noes Soediono
2. Bapak Ketut Suardana Linggih
3. Bapak Hariyadi Sukamdani
4. Bapak Rachmat Gobel

**Peserta** : 50 Orang (Daftar Peserta terlampir)

**Melalui pembahasan yang intensif terhadap Bahan/Materi Rapimnas Kadin 2006**

- :
1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara
  2. Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia
  3. Executive summary Program Kerja Kadin 2006
  4. Hasil Sidang Komisi B

**Dengan Acuan Utama :**

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui perubahannya dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004
3. Keputusan Rapimnas Kadin 2005 tentang Program Kerja Kadin 2005
4. Usulan peserta rapimnas Kadin 2006 dan tanggapan Dewan Pengurus Kadin Indonesia 2006 terhadap setiap usulan tersebut

**Pengantar:**

Bahwa dalam rangka menuju visi Kadin Indonesia 2010 maka diharapkan Kadin Indonesia membuat grand program secara kongkrit dan sistematis untuk selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan Kadin Indonesia mulai 2006-2010.

**HASIL SIDANG**

Sidang Komisi B: Program Kerja Kadin, yang membahas Rancangan Program Kerja Kadin 2006 telah menghasilkan keputusan bahwa seluruh peserta rapat pada komisi B menyetujui rancangan program kerja Kadin 2006 menjadi program dengan catatan ada beberapa tambahan dan koreksi antara lain:

1. Dalam rangka menuju program visi 2010 Kadin Indonesia, maka diharapkan penyusunan rancangan program kerja Kadin Indonesia harus lebih strategis, terukur sistematis, dan mencatumkan tujuan dan sasaran yang kongkrit serta waktu pelaksanaannya yang disajikan dalam bentuk program.
2. Bahwasanya rancangan program yang telah dibuat oleh Kadin Indonesia mendapat koreksi kalimat terutama pada halaman 5, 6, tambahan program pada halaman 18 yaitu dengan menambahkan: 1, mengupayakan pembentukan badan advokasi pajak, 2. pembentukan lembaga keuangan daerah, 3. pembentukan lembaga penjamin kredit

daerah. Pada halaman 46 terdapat koreksi-koreksi kalimat antara lain point 08 pokja beras, point 12. pokja mekanisasi pertanian.

3. Dari seluruh masukan para peserta rapat komisi B yang berasal dari Kadin Daerah antara lain: Kadin NTB, Kadin Lampung, Kadin Sulteng, Kadin Kepri, Kadin Yogya, Kadin Jawa Barat, Kadin Jawa Timur, Kadin NTT dan Asosiasi Inpemigas dan Astindo pada dasarnya sepakat agar Kadin Indonesia dalam penyusunan program secara terperinci haruslah bersifat strategis, acceptable, menyentuh langsung pada masyarakat dunia usaha.
4. Bahwa adanya usulan dari peserta agar Kadin Indonesia mulai membahas secara lebih kongkrit mengenai sistem tendering yang ada pada jasa konstruksi maupun pada jasa non konstruksi yang berkaitan dengan penawaran the lowest tendering atau the lowest responsible bid. Hal ini mengingat ternyata sistem ini memberikan dampak buruk terhadap persaingan yang kurang sehat dikalangan dunia usaha, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan.
5. Kadin Indonesia pada tahun 2006 ini diharapkan dapat membuat program unggulan mengenai Indonesia incorporated.

### **REKOMENDASI**

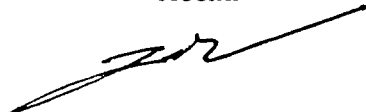
Komisi B merekomendasikan kepada Pengurus Kadin Indonesia agar memasukkan pula dalam program kerja Kadin 2006 antara lain:

1. Bahwa Kadin Indonesia sesuai ART pasal 14 ayat 2 perlu melaporkan tentang keuangan didalam Rapimnas.
2. Bahwa paling cepat akhir tahun 2006, atau paling lambat tahun 2007 Kadin Indonesia sudah menyelesaikan masalah Peraturan Pemerintah tentang Kadin sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Tahun 1 tahun 1987.
3. Bahwa Kadin Indonesia sesegera mungkin melakukan upaya pembahasan dengan Pemerintah dalam rangka revisi Keppres 80 tahun 2003, agar eksistensi Kadin dapat lebih nyata.
4. Kadin Indonesia pada tahun 2006 ini perlu mencanangkan program memaksimalkan pengembangan entrepreneurship Indonesia guna menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Jakarta, 7 Maret 2006

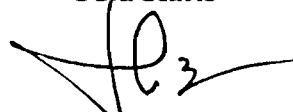
#### **Pimpinan Sidang Komisi B**

**Ketua**



**Hamzah**

**Sekretaris**



**Handito Hadi Joewono**

**LAPORAN HASIL SIDANG KOMISI C  
KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS DUNIA USAHA  
MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL**

**RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2006  
7 MARET 2006**

---

**Pimpinan Sidang**

Ketua : Sundoro (Kadin Jawa Tengah)  
Wakil Ketua : H. A. Sofian Pane (Kadin DKI)  
Sekretaris : Heru Widjarmiko (INPEMIGAS)  
Anggota : Edyono Salatun (APMI)  
Mohammad Gunther Gemparalam (APTEK)  
Dito Ganinduto (Kadin Indonesia)  
Eva Rianti Hutapea (Kadin Indonesia)

**Nara Sumber:** Iman Sucipto Umar  
Ketua LP3E Kadin Indonesia

**Tim Perumus**

Ketua : Dito Ganinduto (KadinIndonesia)  
Sekretaris : Trihono Sastrohartono (Sekretariat Kadin Indonesia)  
Anggota : Iman Sucipto Umar (LP3E Kadin Indonesia)  
Eva Rianti Hutapea (Kadin Indonesia)  
Sarwi Notoatmodjo (Kadin Indonesia)  
Heru Widjarmiko (INPEMIGAS)  
Bambang Praptomo (Koite Tetap Ketenagalistrikan  
Kadin Indonesia)  
H. A. Sofian Pane (Kadin DKI)  
Yohanes Alx Ninu (Kadin Nusa Tenggara Timur)  
Ahmad Musaddeq (Kadin Jabar)  
Edyono Salatun (APMI)  
Suhadi (APPI)  
Airlangga Satriagung (Kadin Jawa Timur)  
Anton Tjahjono (Komite Tetap Hilir Migas Kadin Indonesia)  
Mohammad Gunther Gemparalam (APTEK)

**Peserta** : 72 orang (Daftar Peserta terlampir)

## **Hasil Sidang**

Sidang Komisi C “Kebijakan Stratejik dan Langkah Taktis” telah dilaksanakan dengan diawali paparan materi sidang oleh Ketua LP3E Kadin Indonesia. Diskusi hangat yang berlangsung telah menghasilkan hasil sidang sebagai berikut:

### ***Pengantar***

Tiga referensi utama yang digunakan adalah:

- Sambutan Pembukaan Ketua Umum Kadin Indonesia pada Rapimnas Kadin 2006
- Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R. I.
- Pemaparan Penasihat Presiden R. I. , Dr. Syahrir
- Pemaparan Menteri Perdagangan R. I.
- Paper yang disajikan untuk Komisi C dan saran, masukan, serta dokumen tertulis

### ***Peringkat Daya Saing di Era Globalisasi***

1. Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang telah membawa perubahan yang sangat cepat dan persaingan semakin ketat, Indonesia dituntut untuk meningkatkan daya saingnya melalui berbagai cara dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimilikinya atau dikuasainya. Peningkatan daya saing tersebut harus dilakukan secara cepat, terarah dan sistematis.
2. Hasil penelitian daya saing Indonesia berdasarkan Growth Competitiveness Index (GCI) menurut World Economic Forum menempati peringkat ke-69 dari 104 negara pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-74 dari 117 negara. Karena itu Indonesia harus mengambil langkah-langkah dengan segera meningkatkan daya saingnya, paling tidak dalam 3 – 4 tahun ke depan setara dengan negara tetangga.
3. Kebijakan pembangunan ekonomi dan strategi industrialisasi di Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat.

### ***Kebijakan Stratejik Industrialisasi***

1. Fokus industrialisasi dimasa depan adalah membangun daya saing ekonomi dan daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik dan internasional, yang secara paralel didukung dengan penyediaan infrastruktur dan pengembangan jasa-jasa.

2. Daya saing suatu negara harus diukur, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, agar diketahui kemampuan bersaing dan mengetahui bagaimana daya saing tersebut dibangun.
3. Dengan mengadlakna pada industrialisasi sebagai wahana pembangunan ekonomi nasional, visi pembangunan ekonomi Indonesia menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia dan memiliki daya saing tinggi.

### ***Konsep Daya Saing***

1. Upaya meningkatkan daya saing harus dilakukan secara berkesinambungan agar tercipta industri yang kuat didukung oleh sumber daya alam yang tangguh dan sekaligus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
2. Untuk membangun daya saing perlu dimanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa. Esensinya adalah menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar: domestik dan luar negeri. Dengan usaha ini terwujud landasan ekonomi yang kuat dalam bentuk stabilitas ekonomi makro dan iklim usaha dan investasi yang sehat.
3. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan sinergi: sektoral, sinergi dengan seluruh daerah dan sinergi dengan seluruh pelaku usaha/organisasi dunia usaha (Kadin, Asosiasi dan sebagainya), serta upaya berkesinambungan dalam mengembangkan kemampuan teknologi, dan upaya meingkatkan nilai tambah di era globalisasi.
4. Sebagai satu negara berkembang, Indonesia seyogyanya memilih strategi industrialisasi yang berdasarkan pemilihan dan penentuan cabang industri yang harus dikembangkan (industri dan sektor ekonomi unggulan). Pemilihan sektor yang harus dikembangkan sangat ditentukan : besarnya potensi yang dimiliki, luas wilayah, ketersediaan SDA baik pertanian dalam arti luas maupun hasil pertambangan, dan kompetensi SDM dan sektor unggulan ini perlu dirinci lebih lanjut baik strategi pengembangannya dan langkah aksi maupun dukungan yang diperlukan.
5. Pada saat ini terdapat produk-produk yang dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu:
  - 1) Industri padat sumber daya alam
  - 2) Industri padat tenaga kerja
  - 3) Industri padat teknologi
  - 4) Industri berbasis pengetahuan.

Dalam situasi ekonomi sejak beberapa tahun terakhir ini, perhatian terhadap industri padat sumber daya alam dan industri padat tenaga kerja dan sektor riil

pada umumnya sangat penting dari semua strata: usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi: menanggulangi pengangguran, menyediakan kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan. Sektor industri ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur, jasa-jasa perbankan, dan jasa-jasa lainnya, termasuk jasa perhubungan dan pelayaran.

### ***Kesimpulan/Hasil-Hasil Sidang Komisi C***

Kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan:

Terhadap paket kebijakan investasi Pemerintah yang dikeluarkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kadin Indonesia memberikan pendapat dan masukan sebagai berikut:

**Pertama,** paket kebijakan investasi ini harus terus dikembangkan dengan langkah-langkah aksi (*action plan*) yang lebih terinci dengan sasaran hasil (*outcome*) konkrit jangka pendek dan jangka menengah:

- Dalam menentukan pilihan atas sektor yang dikembangkan dibutuhkan kesamaan pandang dan kerelaan untuk membayar "harga" lebih mahal
- Membuat prioritas berdasarkan komoditas dan atau berdasarkan wilayah sehingga lebih fokus dan penyusunan Peta Potensi SDA di setiap Kabupaten/Kota
- Perbaiki pelayanan birokrasi dan mengurangi/meniadakan ekonomi biaya tinggi
- Harmonisasi tarif dan memberikan insentif yang nyata untuk meningkatkan daya saing sektor riil (bukan proteksi)
- Menciptakan lembaga keuangan yang sehat untuk mendukung kegiatan sektor riil
- Mengembangkan berbagai alternatif energi
- Dukungan infrastruktur dan peraturan perundangan yang diperlukan

**Kedua,** dalam rangka mengembangkan ekonomi dan sekaligus memperkuat daya saing diusulkan agar Pemerintah bersama dengan Kadin Indonesia membentuk Badan Koordinasi Pemanfaatan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri yang dikaitkan dengan sistem Produksi. Rancangan Pokok-Pokok Pikir pembentukan Badan ini telah dirumuskan oleh Bidang Energi dan Resources Kadin Indonesia agar menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk diproses selanjutnya.

**Ketiga,** Kadin Indonesia, Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi secara terus menerus memberikan masukan untuk mewujudkan iklim

usaha yang *business friendly*, konsistensi dan menjamin kepastian berusaha; **bila perlu memberikan masukan untuk mengoreksi kebijakan pembangunan dan strategi yang ditempuh.**

**Keempat,** dunia usaha harus terus melakukan konsolidasi, menjalankan fungsinya, melaksanakan *good corporate governance*, memanfaatkan pasar global yang terbuka sangat lebar. Banyak negara yang menjadi kuat ekonominya dan berdaya saing oleh karena ekspornya berkembang dengan pesat. Organisasi dunia usaha harus mampu mengembangkan organisasinya agar dapat memberikan pelayanan kepada dunia usaha.

**Kelima,** Kadin Indonesia mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan membuat market intelligence di negara pesaing untuk mengembangkan proyek unggulan di daerah yang perlu didukung oleh lembaga perbankan.

**Keenam,** pembentukan jaringan bisnis dengan Kadin Daerah sebagai simpul-simpul jaringan bisnis daerah,

**Ketujuh,** perkuatan Lembaga Keuangan Penjaminan Kredit (PT. PKPI)

**Kedelapan,** pembuatan Peta Potensi Investasi berbasis Kabupaten/Kota, pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perluasan kesempatan berusaha serta penumbuhan entrepreneur baru.

**Kesembilan,** melakukan market intelligence, dan menyusun produk unggulan

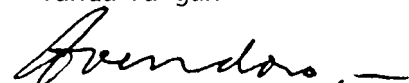
Demikian hasil-hasil Sidang Komisi C "Kebijakan Strategik dan Langkah Taktis" Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2006.

Jakarta, 7 Maret 2006

#### Pimpinan Sidang Komisi C

**Ketua**  
Sundoro

Tanda Tangan



.....

**Wakil Ketua**  
Sofyan Pane

**Sekretaris**  
Heru Widjatmiko

**Anggota**  
Edyono Salatun

Mohammad Gunter

Dito Ganinduto

Eva Rianti Hutapea

Handwritten signatures of Sofyan Pane, Heru Widjatmiko, Edyono Salatun, Mohammad Gunter, and Dito Ganinduto, each on a dotted line.